

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK
BAGI HASIL PEMILIK PERAHU DENGAN PEKERJA
PADA PENYEBERANGAN PULAU PISANG
(Studi di Dermaga Kuala Stabas Krui, Pesisir Barat)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

**ANJELLA AYU WIDYA MUKTI
NPM : 1621030546**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK
BAGI HASIL PEMILIK PERAHU DENGAN PEKERJA
PADA PENYEBERANGAN PULAU PISANG
(Studi Dermaga Kuala Stabas Krui, Pesisir Barat)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

**ANJELLA AYU WIDYA MUKTI
NPM : 1621030546**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag.,M.Ag

Pembimbing II : Muslim S.H.I., M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

ABSTRAK

Di Dermaga Kuala Stabas Krui, Pesisir Barat terdapat praktik kerjasama bagi hasil dalam mengantarkan penumpang ke Pulau Pisang (Naksi), yaitu antara pemilik perahu (kapten) dengan pekerja (AG). Pada kerja sama ini, pemilik perahu sebagai penyedia modal dalam usaha mengantarkan penumpang menyeberang ke Pulau Pisang (naksi), sementara pekerja nya berkontribusi dalam hal tenaga. Dalam kesepakatan awal perhitungan bagi hasilnya adalah jika kapten ikut serta mengelola modal maka dibagi, yaitu dengan bagian 1 bagian untuk pemodal, 1 bagian untuk kapten, 2 bagian untuk 2 orang pekerja. Namun jika kapten tidak ikut serta maka dibagi 3, yaitu 1 bagian untuk pemodal, 2 bagian untuk 2 orang pekerja. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah praktik bagi hasil yang dilakukan di lapangan adalah kapten ikut tidak ikut serta mengantarkan penumpang tetap di bagi 4.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik kerja sama bagi hasil (*mudharabah*) pemilik perahu dengan pekerja pada penyeberangan Pulau Pisang, Krui, Pesisir Barat. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik kerjasama bagi hasil (*mudharabah*) pemilik perahu dan pekerja pada penyeberangan Pulau Pisang, Krui, Pesisir Barat. Tujuan Penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui Praktik kerja sama bagi hasil (*mudharabah*) pemilik perahu dengan pekerja pada penyeberangan Pulau Pisang. 2) untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik kerjasama bagi hasil (*mudharabah*) pemilik perahu dan pekerja pada penyeberangan Pulau Pisang, Krui, Pesisir Barat.

Jenis penelitian ini adalah (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu metode dalam penelitian suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi (menggambarkan) data-data yang dapat diambil sebagai rujukan untuk selanjutnya dianalisis secara sistematis untuk menunjang dalam pembahasan.

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: kerjasama bagi hasil yang dilakukan kapten dan Ag pada penyeberangan Pulau Pisang adalah akad kerja sama yang diperbolehkan dalam Islam, karena bentuk kerja sama yang mereka lakukan adalah bentuk kerja sama *mudharabah* yang mana pemilik perahu (kapten) memberikan modal berupa perahu dan pekerja (AG) memberikan jasa. Akan tetapi akad yang digunakan dalam perjanjian ini batal sebab, waktu dan jumlah dalam pembagian hasil antara pemilik perahu dengan pekerja itu tidak jelas, dan rukun ketiga dalam *mudharabah* yaitu ijab dan qabul nya tidak sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. karena menurut ulama Hanafiah, jika pembagian hasil tidak dilakukan sesuai proporsi yang telah disepakatai di awal, maka akadnya batal.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anjella Ayu Widya Mukti

NPM : 1621030546

Jurusan : Mu'amalah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Kerjasama Bagi Hasil Pemilik Perahu dengan Pekerja pada Penyeberangan Pulau Pisang (Studi di Dermaga Kuala Stabas Krui, Pesisir Barat”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasikan ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, Januari 2021
Penulis



Anjella Ayu Widya.M
1621030546



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL PEMILIK
PERAHU DENGAN PEKERJA PADA
PENYEBERANGAN PULAU PISANG (Studi Dermaga
Kuala Stabas Krui, Pesisir Barat)**
Nama : **Anjella Ayu Widya Mukti**
NPM : **1621030546**
Fakultas : **Syari'ah**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M. Ag

Muslim, S.H.I., M.H.I.

NIP.197012282000031002

NIP.

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah**

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Bagi Hasil Pemilik Perahu dengan Pekerja Pada Penyeberangan Pulau Pisang (Studi Dermaga Kuala Stabas Krui, Pesisir Barat)”** disusun oleh **Anjella Ayu Widya Mukti**, NPM : **1621030546**, Prodi : **Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Senin, 11 Januari 2021**

TIM MUNAQSAH

Ketua Sidang : Khoiruddin, M.S.I

Sekretaris : Juhrotul Khulwah, M.S.I

Penguji I : Dr. Moh. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag

Penguji III : Muslim, S.H.I., M.H.I

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah**



Dr. H. Khairuddin, M.H
NPM. 196210221993031002

MOTTO

..... وَالْآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴿٢٠﴾

Artinya: “dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah” (Q.S Al-Muzammil:20)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Orang tua ku tercinta Ayahanda Edwin Hakim dan Ibu Yoslida Wati, terimakasih atas semua kasih sayang dan selalu senantiasa mendo'akan dalam setiap do'anya, menasehati dan selalu membimbingku dengan penuh kasih sayang tanpa mengenal lelah, selalu memberikan dukungan baik dukungan moril dan materil, dan terimakasih sangat mendalam selalu mendengarkan keluh kesah selama melaksanakan studi, terimakasih atas segala curahan kasih sayang yang tak terhingga selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini.
2. Kakakku tercinta Guswina wati, Merah Syaputra, dan kakak ipar ku Dede Sugiarto, terimakasih untuk suport dan semangatnya di saat saya merasa lelah sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini.
3. Dosen Pembimbing I, bapak Dr. H. Muhammad Zaki., S.Ag., M.Ag dan dosen pembimbing II, bapak Muslim, S.H.I., M.H.I. Terimakasih atas bantuan tenaga, pikiran, dan bimbingannya dari awal penyusunan skripsi ini sampai selesai.
4. Teman-Teman Angkatan 2016 terkhusus kelas K.
5. Sahabat - sahabatku TriAyuRisMaSiRaHid (Nisa, Ence, Siti, Intan, Yoyon, Yoca) dan juga sahabat-sahabatku Kencleng Squad (Agna, Tanti, Devi, Anisa F,

- Rohma, Jimi, Rio, Habib, Dely, Inggar) dan teman seperjuangan Revi, Zirna, Nofri, Via, Fenti, Esti, dan yang lainnya tidak bisa ku sebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi penyemangat disaat ku merasa lelah dan tak ingin melanjutkan drama dalam perskripsian ini, sampai akhirnya bisa terselesaikan.
6. Teman disegala musim Delly Erdiansyah, terimakasih selalu ada di setiap proses perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini.
 7. UKM KSR PMI unit UIN Raden Intan Lampung khususnya angkatan 19.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Anjella Ayu Widya Mukti di lahirkan di kroi, Pesisir Barat pada tanggal 12 November 1997, anak ketiga dari pasangan bapak Edwin Hakim dan Ibu Yoslida Wati. Memiliki 2 saudara kandung yaitu Guswina Wati dan Merah Syaputra. Penulis menyelesaikan Pendidikan di :

1. Taman Kanak-Kanak Asyiah, pada tahun 2004
2. Sekolah Dasar Negeri 1 Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat lulus pada tahun 2010
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tanah Lapang, Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, lulus pada tahun 2013
4. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, lulus pada tahun 2016
5. Pada tahun 2016, Penulis melanjutkan Pendidikan sarjana 1 di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr . Wb.

Alhamdulillah, Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan karunianya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pemilik Perahu Dengan Pekerja Pada Penyeberangan Pulau Pisang (Studi Dermaga Kuala Stabas Krui, Pesisir Barat)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan dan kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi besar, Muhammad SAW. Beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman. Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tidak lupa di haturkan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terimakasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Khoiruddin, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag.,M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Muslim, S.H.I., M.H.I. selaku pembimbing II. Terimakasih telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen dan Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah ikhlas memberikan ilmu-ilmunya dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepada Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta Staf yang telah turut memberikan data berupa literatur sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada Kedua Orang tua, kakak, serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan, do'a, serta menunjang pendidikan peneliti hingga sampai di titik ini.
8. Seluruh masyarakat sekitar Dermaga Kuala Stabas yang telah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan dan bantuan kerja sama hingga terselesainya skripsi ini.

Semoga semua bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada peneliti mendapatkan ridho dan sekaligus sebagai catatan amal ibadah dari Allah SWT. Amin ya Rabbal 'alamin. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih terbatasnya ilmu, pemahaman, dan teori penelitian yang peneliti miliki. Oleh karenanya kepada para pembacanya kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran yang sifatnya membangun. Dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN :	
A.....	Penegasan
Judul	1
B.....	Alasan
Memilih Judul.....	2
C.....	Latar
Belakang Masalah	2
D.....	Fokus
Penelitian	8
E.....	Rumusan
Masalah.....	8
F.....	Tujuan dan
Kegunaan Penelitian	8
G.....	Signifikans
i Penelitian	9
H.....	Metode
Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI :	
A.....	Perjanjian
dalam UUHPerdara.....	16
1.....	Pengertian
Perjanjian	16
2.....	Syarat Sah
Perjanjian	17
3.....	Asas-Asas
Hukum Perjanjian	19
4.....	Hapusnya
Perjanjian	21
5.....	Teori
Dalam Hukum Perjanjian	23
B.....	Mudharaba
h	27

1.	Pengertian
	Mudharabah	27
2.	Dasar
	Hukum Mudharabah	31
3.	Jenis-jenis
	Mudharabah	35
4.	Rukun dan
	Syarat Sah Mudharabah	38
5.	Hukum
	Mudharabah	44
6.	Prinsip-
	Prinsip Mudharabah.....	45
7.	Ketentuan
	Bagi Hasil Prinsip Mudharabah.....	48
8.	Biaya
	Operasional Mudharabah.....	52
9.	Resiko
	Kerugian Dalam Akad Mudharabah.....	53
10.	Hikmah
	Mudharabah	54
11.	Berakhirny
	a Mudharabah	55
C.	Tinjauan
	Pustaka	57
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN:		
A.	Gambaran
	Umum Dermaga Kuala Stabas	60
1.	Sejarah
	Berdirinya Dermaga	60
2.	Struktur
	Organisasi Pemerintahan Desa	63
3.	Kondisi
	Sosial Budaya	65
4.	Kondisi
	Sosial Ekonomi.....	67
5.	Kondisi
	Sosial Keagamaan.....	69
B.	Praktik
	Bagi Hasil Antara Pemilik dan Pekerja	70
BAB IV ANALISA DATA :		
A.	Pandangan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil
	pemilik Perahu	
	dengan pekerja	76

B.....Praktik Bagi Hasil antara Pemilik Perahu dengan Pekerja pada Penyebrangan Pulau Pisang	78
--	----

BAB V PENUTUP:

A.....Kesimpula n	83
B.....Saran	84

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis yang ada di Desa

Kuala Stabas Tahun 2020	64
-------------------------------	----

Tabel 2 Daftar Nama Pemilik Perahu dan Pekerja pada Penyeberangan

Pulau Pisang 70



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk memudahkan dan menghindari kesalah pahaman dalam memahami pengertian atau maksud dari skripsi ini dan sebelum melangkah kepada pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang arti atau definisi dari istilah-istilah yang terkandung di dalam judul, adapun judul skripsi ini adalah: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pemilik Perahu Dengan Pekerja Pada Penyeberangan Pulau Pisang”** istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. **Tinjauan** adalah hasil meninjau pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki dan mempelajari dan sebagainya).¹
2. **Hukum Islam** adalah serangkaian aturan hukum Islam yang mengatur pola akad atau transaksi antarmanusia yang berkaitan dengan harta²
3. **Bagi Hasil** adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola.³
4. **Pulau Pisang** adalah sebuah kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Pesisir Barat

¹Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470

²Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 7

³Dr Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 194

Berdasarkan penjelasan istilah di atas dapat ditegaskan bahwa maksud skripsi ini adalah mengkaji tentang praktik bagi hasil antara pemilik perahu dengan pekerja pada penyeberangan Pulau Pisang di tinjau dalam hukum Islam .

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih dan menentukan judul Skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

Telah terjadi praktik bagi hasil antara pemilik perahu dengan pekerja pada penyeberangan Pulau Pisang dengan menggunakan sistem bagi hasil yaitu jika pemilik perahu ikut serta di bagi 4 namun jika pemilik perahu tidak ikut serta maka dibagi 3. Namun seiring berjalannya waktu terjadi perubahan dalam pembagian hasil tanpa adanya pembaruan akad yaitu pemilik perahu ikut tidak ikut serta tetap dibagi 4.

2. Alasan Subyektif

- a. Masalah ini menarik untuk diteliti.
- b. Ditinjau dari aspek bahasan, kajian judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang telah dipelajari dalam bidang *Muamalah* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta didukung oleh tersedianya data-data dan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan Skripsi kali ini.

C. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal karena permasalahan yang dibahas menyeluruh dalam kehidupan, baik tentang ibadah, syariah maupun akhlak.

Pembahasan dalam Islam meliputi semua aspek tidak tekecuali *mu'amalah*. Kehidupan manusia didunia sebagai makhluk sosial tidak akan terlepas dari kegiatan berekonomi atau dalam Islam disebut *mua'malah*.

Kata *mu'amalah* berasal dari bahasa arab (المعاملة) yang secara terminologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh individu dengan individu lain atau sekelompok individu, dalam memenuhi kebutuhan hidup.⁴

Fiqh mu'amalah sendiri dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda. Lebih ringkasnya, *fiqh mu'amalah* dapat diartikan sebagai aturan dalam syariat Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia.⁵

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa melakukan suatu kegiatan apapun atau kegiatan perekonomian tanpa bantuan dan dukungan dari orang lain, dengan kata lain dalam melakukan suatu kegiatan usaha, seseorang akan membutuhkan orang lain atau seorang yang ahli agar usaha yang di kelola berjalan sesuai dengan yang di harapkan.

Kehidupan bermasyarakat banyak sekali masalah-masalah yang timbul antara orang satu dengan yang lain dalam melakukan perikatan atau kerjasama dalam melakukan suatu pekerjaan yang menghasilkan sebuah manfaat bagi orang yang melakukan pekerjaan tersebut, dan bagi hasil yang harus di utamakan dalam sebuah

⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.7

⁵Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.119

kegiatan tersebut, penulis akan membahas tentang bagi hasil antara pemilik perahu dan si pekerja. Bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik dan seseorang pada pihak lain yang dalam undang-undang di sebut penggarap berdasarkan perjanjian penggarap di perkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha.⁶

Perjanjian dalam Islam di sebut “*akad*” kata akad berasal dari kata *al-aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan.⁷ Bagi orang yang memiliki modal, tetapi tidak memiliki keahlian dalam menjalankan roda perusahaan dan ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modal nya dengan kepada pihak yang memerlukan, disisi lain tak jarang pula di temui orang yang memiliki kemampuan dan keahlian tetapi tidak memiliki modal,⁸ bagi mereka yang tidak dapat memproduktifkan hartanya, Islam menganjurkan untuk memberikan modal (dana) kepada yang membutuhkan modal demi kelancaran usaha mereka dengan prinsip *mudharabah*.

Salah satu bentuk kerjasama bagi hasil dalam ekonomi syari’ah adalah *mudharabah*. *mudharabah* menurut istilah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha. Satu pihak akan menyerahkan modal 100% yang disebut *shahibul mall* dan pihak lainnya akan bertindak sebagai pengelola usaha yang disebut *mudharib*. Bagi hasil usaha yang di kerjasamakan

⁶Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 61

⁷Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 68

⁸Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), h. 12

dihitung sesuai dengan *nisbah* yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerjasama.⁹ *Nisbah* adalah persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil keuntungan atas usaha yang di kerjasamakan.

Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak¹⁰. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal. Pemodal (*rab al-mall*) tidak boleh intervensi kepada pengguna dana (*mudharabah*) dalam menjalankan usahanya.

Seperti di jelaskan dalam Al-qur'an QS. Al-Faathir ayat 12 :

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاجِرَ
لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾

“Dan tiada sama (antara) dua laut; yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya, dan pada masing-masingnya kamu Lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang muslim dalam menjalankan aktivitas perekonomian tidak akan pernah lepas dari interaksi orang lain, untuk menjalankan

⁹Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*.....,h.13

¹⁰Sudiarti Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Febi UIN-SU Press, 2018), h. 161

aktifitas perekonomian, manusia menjalin kerja sama dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan, seperti hal nya kerjasama antara pemilik perahu dengan pekerjanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Agama tidak memberikan suatu ketentuan yang pasti tentang kadar keuntungan yang akan di miliki oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian *mudharabah*. Persentase keuntungan yang akan di bagi antara pemilik modal dan pelaksana usaha bisa berbentuk bagi rata atau tidak bagi rata. Hal ini di kembalikan kepada kesepakatan yang sudah mereka buat sebelumnya salah satu prinsip penting yang di ajarkan oleh Islam dalam lapangan *muamalah* ini adalah bahwa pembagian itu di pulangkan kepada kesepakatan yang penuh kerelaan serta tidak merugikan dan di rugikan oleh pihak manapun.¹¹ Seperti halnya yang ada di Dermaga Kuala Stabas terdapat Nelayan yang melakukan kerja sama yaitu antara pemilik perahu dengan pekerja. Pekerja bekerja sama dengan pemilik perahu berdasarkan sistem bagi hasil. Modal yang berupa perahu dan mesin berasal dari pemilik perahu, sedangkan si pekerja memberikan kontribusi berupa tenaga dan keterampilan dalam kegiatan kerja sama ini.

Nelayan di Dermaga Kuala Stabas Krui Pesisir Barat yang sehari-harinya bukan hanya menggunakan perahu untuk mencari ikan saja tetapi juga ada yang menggunakan perahu tersebut untuk mengantarkan warga masyarakat menyeberang ke Pulau Pisang (naksi), dan kebanyakan warga masyarakat yang menyeberang pada hari-hari tertentu saja seperti hari raya Idul Fitri dan tahun baru, jika hari-hari biasa

¹¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), h. 15-16

hanya masyarakat yang asli Pulau Pisang saja yg menyeberang karena akan ke pasar dengan keperluan belanja segala kebutuhan .

Warga masyarakat yang akan menyeberang menuju Pulau Pisang dengan menggunakan perahu tersebut dikenakan tarif mulai dari Rp.25.000 hingga Rp.30.000 perorang. Dari hasil mengantarkan warga menyeberang (naksi), pemilik perahu dan pekerja melakukan bagi hasil, akan tetapi terlebih dahulu digunakan untuk keperluan membeli rokok, makan, serta solar untuk mesin yang digunakan di perahu saat menyeberang, dan sisa nya baru dibagi antara pemilik perahu dan pekerja dengan sistem bagi hasil. Di satu perahu terdapat 1 orang pemilik perahu dan 2 orang pekerja, di dalam perjanjian awal kerja jika pemilik perahu ikut serta dalam mengantarkan penumpang, maka di bagi 4. Akan tetapi jika pemilik perahu tidak ikut serta mengantarkan penumpang maka di bagi 3. Namun dengan berjalannya waktu muncul masalah terkait sistem pembagian hasil dalam kerja sama tersebut, di antaranya tidak adanya kepastian jumlah upah dan waktu pembagian hasil tersebut, dan diawal akad telah disepakati oleh pemilik perahu dengan pekerja bahwa sistem pembagian hasil tersebut yaitu jika pemilik perahu tidak ikut serta mengantarkan penumpang pembagian hasil di bagi 3, dan jika ikut serta maka di bagi 4, namun dalam praktiknya, pemilik perahu ikut tidak ikut tetap minta di bagi 4.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut dalam bentuk penelitian yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu dengan Pekerja pada Penyeberangan Pulau Pisang”

D. Fokus Penelitian

1. Praktik bagi hasil (*mudharabah*) antara pemilik perahu dengan pekerja pada penyeberangan Pulau Pisang.
2. Pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik bagi hasil (*mudharabah*) pemilik perahu dengan pekerja pada penyeberangan Pulau Pisang.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, untuk lebih akurat dan sistematisnya perlu di rumuskan permasalahan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik bagi hasil (*mudharabah*) pemilik perahu dengan pekerja pada penyeberangan Pulau Pisang, Krui Pesisir Barat ?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam tentang praktik bagi hasil (*mudharabah*) pemilik perahu dan pekerja pada penyeberangan Pulau Pisang, Krui Pesisir Barat?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :
 - a) Untuk mengetahui praktik bagi hasil (*mudharabah*) pemilik perahu dan pekerja pada penyeberangan Pulau Pisang, Krui Pesisir Barat.
 - b) Untuk Mengetahui tinjauan hukum positif dan hukum Islam tentang praktik bagi hasil (*mudharabah*) pemilik perahu dan pekerja pada penyeberangan Pulau Pisang, Krui Pesisir Barat.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Secara teoritis, yaitu untuk memberikan sumbangsih bagi khazanah pemikiran Islam pada umumnya civitas akademik fakultas syari'ah jurusan Mu'amalah khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung.
- b) Secara praktis, yaitu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan rasa keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat Islam dalam acuan pelaksanaan kejasama bagi hasil anantara pemilik perahu dengan pekerja sesuai syari'at Islam.

G. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai praktik bagi hasil pemilik perahu dan pekerja dan juga dapat menambah pengetahuan atau keilmuan serta pemikiran ke-Islaman. Selain itu diharapkan menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada para akademisi dalam mengaplikasikan teori-teori yang berhubungan dengan tema penelitian tersebut. Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis dan diambil sebuah kesimpulan dan selanjutnya dicarikan penyelesaiannya.¹²

Agar sistematis dalam pencapaian tujuan penulisan skripsi ini, maka diperlukan suatu metode dalam sebuah penelitian. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di tengah masyarakat kita dalam bentuk gejala atau proses sosial¹³, terkait penelitian ini yaitu cara-cara yang digunakan peneliti dalam merancang, melaksanakan, dan menarik kesimpulan berkenaan dengan masalah penelitian. Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian perpustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

b. Sifat Penelitian

¹²Jogo Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h.2

¹³Susiadi, *Metodelogi Penelitian*, (Bandar Lampung: Penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 12

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode dalam mengumpulkan data sebanyak-banyaknya sesuai dengan pokok permasalahan yang ada dan menggambarkan secara terbuka sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Terkait penelitian ini yaitu memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sample yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

2. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan pelaksanaan bagi hasil pemilik perahu dan pekerja dalam ketentuan syariat Islam, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti terhadap gejala yang ada di lokasi kasus penelitian, wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini melalui pertanyaan yang sudah disiapkan. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari hasil wawancara langsung kepada pekerja dan pemilik pada perahu tersebut.

b. Data Sekunder

Data yang di sajikan oleh pihak lain yang diperoleh dari studi perpustakaan, yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa Al-Qur'an, tafsir, Hadis.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku *fiqh muamalah*, buku-buku tentang *mudharabah*, Perundang-undangan, jurnal- jurnal yang memiliki keterkaitan dengan judul skripsi yang di bahas.

3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus ensiklopedia, artikel dan lain sebagainya.

3. Populasi

Populasi yang digunakan untuk menyebutkan keseluruhan subjek yang akan menjadi sasaran dalam objek penelitian.¹⁴ Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Anggota populasi disebut dengan elemen populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 8 orang yaitu terdiri 3 orang pemilik perahu dan 5 orang pekerja.

Berdasarkan Teori Suharsimi Arikunto, mengatakan bahwa apabila populasi lebih dari 100 orang, maka dapat ditarik sample 10% - 15% , namun jika populasi kurang dari 100 orang, maka sample di ambil keseluruhan, sehingga penelitian ini termasuk kedalam penelitian populasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut :

a. Observasi

Pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.

b. Interview (wawancara)

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 173

Pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab (*interview*) secara langsung kepada objek penelitian yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis yang akan diteliti.

Macam – macam wawancara terbagi menjadi empat:

- 1) Wawancara pribadi, yaitu sebuah wawancara yang dilakukan satu orang peneliti dengan satu orang responden yang pertanyaannya berkembang dan bertahap
- 2) Wawancara terstruktur, yaitu sebuah wawancara yang memperhatikan unsur 5W+1H tanpa berkembang menjadi pokok-pokok pertanyaan yang lain.
- 3) Wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan tidak berdasarkan pokok –pokok pertanyaan dan langsung diberikan secara spontan
- 4) Wawancara mendalam yaitu wawancara yang sifatnya pribadi antara responden dan peneliti. Wawancara mendalam ini dapat mengandung unsur struktur dan tidak berstruktur.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku-buku, agenda dan lain sebagainya.

5. Pengolahan Data

Data terhimpun atau terkumpul maka langkah selanjutnya adalah mengolah data agar menjadi sebuah penelitian yang sempurna yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Editing

Mengoreksi apakah data yang terkumpul atau terhimpun sudah lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian¹⁵. Dalam hal ini dilakukan pengecekan kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, observasi, *interview* apakah semua sudah lengkap, jelas, tidak berlebihan dan relevan.

b. Coding

Pemberian tanda pada kata yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya.

c. Sistematis

Menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini adalah data di kelompokkan secara sistematis, yaitu yang sudah di edit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.

6. Analisis Data

Setelah semua data diperoleh selanjutnya dapat dianalisis. Sedangkan metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu, tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil pemilik perahu

¹⁵Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 182

dan pekerja pada penyebrangan Pulau Pisang. Setelah analisis data selesai, maka hasil yang akan disajikan secara Deskriptif dengan analisis Kualitatif yang disusun secara bertahap dan berlapis, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis, dan kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian dengan menggunakan berfikir induktif, yaitu mencari, menjelaskan, dan memahami prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam kehidupan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perjanjian Dalam UUHP

1. Pengertian Perjanjian

Dalam buku III kitab undang-undang hukum Perdata diatur perihal hubungan hukum yang sama dan tidak bersumber pada perjanjian yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan melanggar hukum dari perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan. Adapun yang dimaksud perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan hubungan tersebut pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk mematuhi tuntutan tersebut.¹

Menurut pendapat Sudikno Martokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum, dengan demikian kedua belah pihak sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah, antara hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk di taati dan di jalankan.²

Dapat dirumuskan bahwa tidak semua perhubungan hukum dapat disebut perikatan, tetapi yang mempunyai akibat hukum, artinya yang menjadi hak dan kewajiban pihak-pihak itu dijamin oleh hukum dan undang-undang. Mengenai sumber perikatan, menurut ketentuan pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum

¹Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Liyas, *Pokok-pokok hukum Bisnis* , (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm.21

²H.U. Adil Samadani, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media,2013), h.31-32

Perdata adalah tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karna persetujuan, maupun karena undang-undang. Dalam hal perikatan yang lahir karena persetujuan menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Berdasarkan uraian diatas dikemukakan perbedaan antara perikatan dengan perjanjian sebagai berikut:

- a. Perikatan itu adalah suatu hubungan hukum, sedangkan persetujuan atau perjanjian adalah suatu perbuatan hukum.
- b. Definisi persetujuan atau perjanjian ada dalam hukum positif.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan definisi dari perikatan tidak ada dalam hukum positif tapi terdapat dalam ilmu pengetahuan.

- c. Perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak, artinya hanya bisa dibayangkan dalam pemikiran. Sedangkan perjanjian adalah hal yang kongkrit atau peristiwa, artinya dapat dilihat dan dibaca.

2. Syarat Sah Suatu Perjanjian (UUHP)

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat yang terdapat pada pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu:

- a. Kesepakatan kedua belah pihak
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Pernyataan sepakat mengikat diri dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian digolongkan kedalam syarat subyektif karena berkenaan dengan kapasitas orang yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat tentang suatu hal tertentu dan sebab yang halal digolongkan kedalam syarat obyektif karena menyangkut objek perjanjian.

Keempat syarat diatas merupakan syarat liminatif dalam suatu perjanjian, syarat tersebut harus terpenuhi sehingga perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat, jika salah syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat berakibat batal atau dapat dibatalkan.

R.Subekti mengatakan apabila tidak terpenuhinya syarat pertama dan kedua, maka perjanjian tersebut dapat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim, sedangkan apabila tidak dipenuhinya syarat ketiga dan keempat maka perjanjian tersebut batal demi hukum.³

Dengan demikian bila ada kepincangan kata sepakat dalam perjanjian, maka dapat dimintakan pembatalan melalui hakim dipengadilan. Selama pembatalan itu tidak dimnta oleh pihak yang bersangkutan, perjanjian tetap berlaku. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1449 KUHPerdara yang menyebutkan “peranjian-

³R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1994),h.20

perjanjian yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan hak tuntutan untuk membatalkannya.

3. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut sebagai berikut:

a. Asas Konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata didalamnya ditemukan istilah “semua”. Kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya yang rasanya baik untuk menciptakan perjanjian. asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian .

b. Asas kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus dapat menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari

c. Asas Kekuatan Mengikat

Terikatnya para pihak pada apa yang di perjanjikan dan juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatuhan, dan kebiasaan akan mengikat para pihak

d. Asas Persamaan Hak

Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan tuhan

e. Asas keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu

f. Asas moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya yang menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. Dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapat dalam pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

g. Asas kepatutan

Asas kepatutan berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian

h. Asas Kebiasaan

Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti

i. Asas kepastian hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum⁴

⁴Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: ALIMNI Bandung, 1994),h. 42-44

Kemudian dalam Pasal 1338 KUHPerdato disebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian dinyatakan mengikat, apabila telah ada kata sepakat mengenai sesuatu hal tertentu.

Sejak saat itu lahirnya hubungan hukum antara para pihak yang membuatnya dan masing-masing pihak terkait satu sama lain, sekaligus menimbulkan hak dan kewajiban. Dan perjanjian yang dibuat secara sah tidak dapat ditarik kembali, apabila ingin ditarik, mak harus dengan persetujuan kedua belah pihak.

4. Hapusnya Perjanjian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melalui Pasal 1383 telah menetapkan beberapa sebab yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian sebagai berikut:

a. Pembayaran

Adapun yang dimaksud dengan pembayaran adalah pelunasan utang atau tindakan pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditur

b. Penawaran Pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (konsinyasi)

Konsinyasi adalah sebuah cara untuk menghapus perikatan. Hal ini karena pada sat debitur hendak membayar hutangnya, pembayarannya ditolak oleh kreditur sehingga debitur dapat menitipkan pembayaran melalui kepaniteraan pengadilan negeri setempat.

c. Novasi (pembaruan utang)

Novasi adalah perjanjian antara debitur dengan kreditur saat perikatan yang sudah ada dihapuskan lalu dibuat sebuah perikatan yang baru

d. Perjumpaan Hutang (Kompensasi)

Kompensasi adalah penghapusan masing-masing utang yang sudah dapat ditagih secara timbal balik antara debitur dan kreditur

e. Pencampuran Hutang

Pencampuran hutang adalah pencampuran kedudukan antara orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur sehingga menjadi satu

f. Pembebasan utang

Pembebasan utang adalah pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari utang

g. Musnah nya barang yang terutang

Musnahnya barang yang terutang diartikan sebagai perikatan hapus dengan musnahnya atau hilangnya barang tertentu yang menjadi pokok prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkannya kepada kreditur.

h. Batal atau Pembatalan

Pembatalan diartikan sebagai pembatalan perjanjian yang dapat dimintakan sebagaimana yang sudah diuraikan sebelumnya pada syarat-syarat sah nya perjanjian

i. Berlakunya suatu syarat batal

Berlakunya suatu syarat batal diartikan sebagai syarat yang apabila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, yaitu seolah-olah tidak ada perjanjian.

j. Lewat waktu atau kadaluarsa

Kadaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh hak atas sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.⁵

5. Teori Dalam Hukum Perjanjian

a. Teori Kepentingan

Kebebasan berkontrak adalah refleksi dari perkembangan paham pasar bebas yang dipelopori oleh Adam Smith. Adam Smith dengan teori ekonomi klasiknya mendasari pemikiran pada ajaran hukum alam, hal yang sama menjadi dasar pemikiran Jeremy Bentham yang dikenal dengan teori kepentingan.⁶

b. Teori Kedaulatan Hukum

Krabble mengatakan “*aldus moet ook van recht de heerscappij gezocht worden in de reactie van het rechtdgevoel, en ligt dus het gezag niet buiten mar in den mens*” artinya dengan kekuasaan hukum yang harus kami cari dari dalam reaksi perasaan hukum, jadi kekuasaan hukum itu tidak terletak tidak terletak diluar manusia tetapi didalam manusia. Hukum berdaulat yaitu diatas

⁵Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Liyas,h.27-28

⁶Sutan Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Pihak-Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia (IBI), 1993),h.17

segala sesuatu, termasuk negara. Oleh karena itu Krabbe, negara yang baik adalah negara hukum, tiap tindakan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada hukum

Asas kebebasan berkontrak dalam melakukan suatu perjanjian merupakan bentuk dari adanya suatu kedaulatan hukum yang dipunyai oleh setiap individu dalam melakukan setiap perbuatan hukum. Setiap individu menurut kepentingannya secara otonom berhak untuk melakukan perjanjian dengan individu lain atau kelompok masyarakat lain.

c. Teori-Teori Berdasarkan Prestasi Kedua Belah Pihak

Teori –teori berdasarkan prestasi kedua belah pihak, menurut Rescoe Pound, sebagaimana dikutip Munir Fuady terdapat berbagai teori kontrak yaitu:

1) Teori Hasrat

Teori hasrat menekankan kepada pentingnya hasrat, dari pihak yang memberikan janji. Ukuran dari eksistensi, kekuatan berlaku dan substansi dari suatu kontrak diukur dari hasrat tersebut. Menurut teori ini yang terpenting dari suatu kontrak bukan apa yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak tersebut, akan tetapi apa yang mereka inginkan.

2) Teori Tawar Menawar

Teori ini merupakan perkembangan dari teori “sama nilai” dan sangat mendapat tempat dalam negara-negara yang menganut sistem common law. Teori sama nilai ini mengajarkan bahwa suatu kontrak hanya

mengikat bahwa suatu kontrak hanya mengikat sejauh apa yang dinegosiasikan (tawar-menawar) dan kemudian disetujui oleh para pihak

3) Teori Sama Nilai

Teori ini mengajarkan bahwa suatu kontrak baru mengikat jika para pihak dalam kontrak tersebut memberikan prestasinya yang seimbang atau sama nilai.

4) Teori Kepercayaan Merugi

Teori ini mengajarkan bahwa kontrak sudah dianggap ada jika dengan kontrak yang bersangkutan sudah menimbulkan kepercayaan bagi pihak terhadap siapa janji itu diberikan sehingga pihak yang menerima janji tersebut karena kepercayaannya itu akan menimbulkan kerugian jika janji itu tidak terlaksana.

d. Teori-Teori Berdasarkan Formulasi Kontrak

Dalam ilmu hukum ada empat teori yang mendasar dalam teori formulasi kontrak, yaitu:⁷

1) Teori kontrak *defacto*

Adalah kontrak yang tidak pernah disebut dengan tegas tetapi ada dalam kenyataan, pada prinsipnya dapat diterima sebagai kontrak yang sempurna.

2) Teori kontrak *ekpresif*

⁷Munie Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya, 2001),h.8-9

Setiap kontrak yang dinyatakan dengan tegas (*ekpresif*) oleh para pihak baik dengan tertulis atau lisan, sejauh memenuhi syarat-syarat sahnyanya kontrak, dianggap sebagai ikatan yang sempurna bagi para pihak.

3) Teori *promissory estoppel*

Disebut juga dengan *detrimental reliance*, adanya persesuaian kehendak diantara pihak jika pihak lawan telah melakukan sesuatu sebagai akibat dari tindakan-tindakan pihak lainnya yang dianggap merupakan tawaran untuk suatu ikatan kontrak.

4) Teori kontrak *quasi*

Disebut juga *quasi contract* atau *implied in law*, dalam hal tertentu apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu, maka hukum dapat dianggap adanya kontrak diantara para pihak dengan berbagai konsekuensinya, sungguhpun dalam kenyataan kontrak tersebut tidak pernah ada.

B. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Menurut istilah *syara' mudharabah* berarti akad antar dua pihak untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan di bagi di antara mereka berdua sesuai isi perjanjian yang telah di sepakati.

Mudharabah berasal dari kata *ad-dharb* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Muzammil ayat 20 yaitu:

....وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.....

Artinya: “dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.”(Q.S. Al-Muzammil:20)

Kata *mudharabah* berasal dari kata *dharaba* pada kalimat *al-dharb*, yaitu bepergian untuk urusan dagang. Menurut bahasa, kata Abdurrahman Al Jaziri, *mudharabah* berarti ungkapan terhadap pemberian harta seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha yang keuntungannya dibagi antara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.⁸

Mudharabah adalah sistem kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (*sahibul mall*) menyediakan seluruh (seratus persen) kebutuhan modal (sebagai penyuntik dana untuk kebutuhan suatu proyek), sedangkan nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) menyediakan keahliannya⁹.

Sutan Remi Sahdeni, mengemukakan bahwa *Mudharabah* adalah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak antara lain:¹⁰

- a. Pihak yang memiliki ataupun menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan, pihak tersebut disebut *shahibul mall*.

⁸Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993), h.11

⁹Hasbi Ash Siddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h.6

¹⁰Helmi Karim,.....,h.12

- b. Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan modal dan menjalankan poyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari *shahibul mall*, pihak tersebut disebut *Mudharib*.

Sedangkan pengertian *Mudharabah* atau *qirad* menurut definisi para ulama sebagai berikut :¹¹

1) Menurut Ulama *Hanafiyah*.

Mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karna harta di serahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu, sebagaimana yang dijelaskan dibawah ini:¹²

عَقْدٌ عَلَى الشَّرْكَاءِ فِي الرِّبْحِ بِمَالٍ مِنْ أَحَدَا الْجَانِبَيْنِ وَعَمَلٍ مِنَ الْآخَرِ

Artinya : “Akad *syirkah* dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.”

2) Pendapat Ulama *Malikiyah*.

Mudharabah adalah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk di perdagangkan dengan pembayaran yang di tentukan (emas dan perak).

3) Pendapat Ulama *Syafi'iyah*.

Mudharabah ialah:

¹¹Sohari sahrani dan ru'fah abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.189-190

¹²Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Fbe UIN-SU Press, 2018), h.159

عَقْدٌ يَقْتَضِي أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ لِأَخْرَمًا لَا يَتَّجِرُ فِيهِ

Artinya: “Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk *ditijarahkan*”

4) Pendapat Ulama *Hanabillah*

Mudharabah adalah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang di ketahui.

5) Sayyid Sabiq berpendapat, *mudharabah* adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntuan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.

6) Imam Taqiyyudin berpendapat:

عَقْدٌ عَلَى نَقْدٍ لِيَتَصَرَّفَ فِيهِ الْعَامِلُ بِالتَّجَارَةِ

Artinya: “Akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan”

Setelah diketahui beberapa pengertian yang di jelaskan oleh para ulama tersebut di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *mudharabah* adalah akad antara pemilik modal dengan pengelola modal. Dengan syarat bahwa keuntungan di peroleh dua pihak sesuai jumlah kesepakatan.¹³ Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*sahib al-mall*) yang menyediakan seluruh modal (100%). Sedangkan pihak lain sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan usaha

¹³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.136-138

yang di dapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang di tuangkan dalam kontrak, dan biasa nya berbentuk *nisbah* (persentase).¹⁴

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.¹⁵

Dengan demikian dapat dipahami bahwa *mudharabah* adalah kerja sama antara dua orang dalam satu perdagangan. Modal atau investasi finansial dari satu pihak, sedangkan pihak lain memberikan tenaga. Dengan kata lain, *mudharabah* adalah meleburnya badan (tenaga) disatu pihak dengan harta dari pihak lain. Artinya satu pihak bekerja, sedangkan pihak yang lain menyerahkan harta. Kedua belah pihak kemudian sepakat dengan presentase tertentu dari hasil keuntungan yang di peroleh.¹⁶

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Islam mensyaria'tkan dan membolehkan kepada umatnya untuk memberikan keringanan kepada sesama manusia. Sebagian orang ada yang memiliki harta, akan tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menjadikan hartanya tersebut lebih produktif. Hal tersebut menjadi salah satu alasan Islam mensyari'tkan untuk bermuamalah, agar kedua belah pihak tersebut dapat mengambil manfaatnya.

¹⁴ Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Mekar Sari, 2008), h. 224

¹⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 61

¹⁶ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), h.100

Akad *mudharabah* merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan orang yang ahli mengelola nya. Berikut adalah dasar hukum berupa ayat Al-Qur'an, AS-Sunah (hadis), serta *qiyas* yang menguatkan diperbolehkannya akad *mudharabah*.

a. Al-Qur'an

Allah berfirman:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ

“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”(Q.S. Al-Baqarah : 198)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”(Q.S Al-Jumu'ah : 10)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.....

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”
(Q.S Al-Baqarah:282)

....فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ.....

Artinya: akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.(Q.S.Al-Baqarah:283)

b. As-Sunnah

Ketika Islam datang, Rasulullah mengakui dan menyetujui akad *mudharabah* ini. Para sahabatnyapun melakukan perjalanan dagang dengan mengelola modal orang lain berdasarkan akad *mudharabah* sementara beliau tidak melarang hal itu. Sunnah merupakan perkataan, perbuatan, dan pengakuan Rasulullah Saw. ketika beliau telah mengakui *mudharabah* berarti *mudharabah* telah ditetapkan oleh sunnah.¹⁷ Diantara hadis yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Suhaib bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ. نَصْرَائِنُ الْقَاسِمِ .
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بْنِ دَوْدَ , عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ ,
عَنْ أَبِيهِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ,, ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ , وَالْمَقَارَضَةُ وَأَخْلَا طُ الْبُرِّ بِا لَشَّعِيرِ اللَّيْتِ لِالْبَيْعِ .

Artinya: “tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan. Melakukan qirad (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk di perjual belikan” (HR. Ibn Majah dari Suhaib).¹⁸

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.478

¹⁸ Abi Abdullah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Darul Fikri, tth), h.720

Ulama menyatakan bahwa keberkahan dalam arti tumbuh dan menjadi lebih baik terdapat pada perniagaan, terlebih pada jual beli yang dilakukan secara tempo ataupun akad *mudharabah* sebagaimana disabdakan Rasulullah Saw. Dengan menunjukkan adanya keberkahan ini, hal ini mengindikasikan diperbolehkannya praktik *mudharabah*.

c. *Ijma'*

Ibn Taymiyah menetapkan landasan hukum *mudharabah* dengan *ijma'* yang berlandaskan pada *nash*. *Mudharabah* sudah di kenal di kalangan bangsa Arab Jahiliah, terlebih dikalangan suku Quraish. Mayoritas orang Arab bergelut di bidang perdagangan. Para pemilik modal memberikan modal mereka kepada para *'amil* (pengelola). Rasulullah Saw pun pernah mengadakan perjalanan dagang dengan membawa modal orang lain sebelum diangkat menjadi Nabi. Beliau juga pernah mengadakan perjalanan dagang dengan mengelola modal Khadijah.¹⁹

Kesepakatan ulama akan bolehnya *mudharabah* diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat melakukan *mudharabah* dengan menggunakan harta anak yatim sebagai modal dan tak seorangpun dari mereka menyanggah atau menolak. Beliau tersebut antara lain Umar Ibn Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amir, dan Aisyah. Jika praktik sahabat dalam suatu amalan tertentu yang di saksikan oleh sahabat yang lain lalu tidak seorangpun menyanggahnya, maka

¹⁹ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo), h.478

hal itu merupakan *Ijma'*. Ketentuan *ijma'* secara *sharih* mengakui keabsahan praktik pembiayaan *Mudharabah* dalam sebuah perniagaan.²⁰

d. Qiyas

Mudharabah di *qiyaskan* kepada *al-musyaqqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya.²¹ Di satu sisi banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* di tujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

3. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Ulama Hanafiah membagi bentuk akad *mudharabah* kepada dua bentuk²² yaitu *mudharabah shahihah* (*mudharabah* yang sah) dan *mudharabah fasidah* (*mudharabah* yang rusak). Jika *mudharabah* itu jatuh pada yang *fasid*, menurut ulama Hanafiah, Syafiiyah dan Hanbaliyah, pekerja hanya berhak menerima upah sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan daerah tersebut, sedangkan seluruh keuntungan menjadi hak pemilik modal. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa dalam *mudharabah fasidah* status pekerjaan tetap seperti dalam *mudharabah shahihah*, dalam artian bahwa ia tetap mendapatkan bagian keuntungan.

²⁰ Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008), h. 154

²¹ *Ibid*, h. 226

²² Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, Jilid V, (Riyadh: Maktabah Ar-riyadh Al-Hadithsah, tt), h. 30

Kemudian dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pekerjaan, para ulama *fiqh* membagi akad *mudharabah* kepada dua bentuk yaitu *mudharabah mutlaqah* (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatalan) dan *mudharabah muqayyadah*, pekerja bisa mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan daerah mana yang diinginkan. Akan tetapi dalam *mudharabah muqayyadah* pekerja harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dikemukakan oleh pemilik modal.

Sejalan dengan pendapat para Ulama *Fiqih*, tokoh-tokoh dalam bidang *fiqh muamalah* pun membagi akad *mudharabah* menjadi kepada dua bentuk yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* yaitu sebagai berikut:

a. Mudharabah Muthlaqah

Merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul mall* dan *mudharib*, yang mana *shahibul mall* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *shahibul mall* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *Shahibul mall* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah Islam.²³

Shahibul mall Kebebasan *mudharib* dalam hal *mudharabah* berbentuk *mudharabah mutlaqah* bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi

²³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Karisma Putra Utama, 2011), h.86

yang dilarang oleh Islam, seperti memproduksi atau mendagangkan minuman keras (meskipun memperoleh izin resmi dari pemerintah) peternakan babi, dan lain sebagainya.

Mudharabah mutlaqoh, *mudharib* juga memiliki mandat yang terbuka dan berwenang untuk melakukan apa saja yang diperlukan bagi keberhasilan tujuan *mudharabah* itu dalam rangka pelaksanaan bisnis yang bersangkutan. Namun apabila *mudharib* melakukan kelalaian atau kecurangan, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang dilakukannya. Apabila terjadi kecurangan atas usaha tersebut, maka kerugian itu tidak dapat menjadi beban perjanjian *mudharabah* yang bersangkutan.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul mall*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharabah*). *Shahibul mall* menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasannya antara lain yaitu:²⁴

- 1) Tempat dan cara berinvestasi
- 2) Jenis observasi
- 3) Objek investasi
- 4) Jangka waktu

²⁴ Syaiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), h.138

Apabila *mudharib* bertindak bertentangan dengan pengawas pembatasan-pembatasan (syarat-syarat) tersebut, maka *mudharib* harus bertanggung jawab sendiri atas konsekuensi yang ditimbulkan. Pada *mudharabah* ini harus dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada waktunya tiba.

Sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *mudharabah muqayyadah* merupakan simpanan khusus, pemilik dana (*shahibul mall*) dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh pihak lain sebagai pengelola (*mudharib*), baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya.

4. Rukun dan Syarat Sah *Mudharabah*

a. Rukun *Mudharabah*

Rukun ialah kata *mufrad* dari kata jama' "*arkan*" artinya asas atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sah (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan dan itu termasuk didalam pekerjaan.²⁵

Rukun *mudharabah* adalah ijab Qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian . dalam ijab qabul tidak disyaratkan adanya lafaz tertentu, akan tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menentukan makna *mudharabah* sebab yang dimaksud dalam akad ini ialah tujuan dan maknanya, bukan lafaz dan susunan kata-katanya.²⁶

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:²⁷

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha).

²⁵ M. Abdul Mujiep, dkk. *Kamus Istilah Fiqh, Cet ke-3*, (Jakarta: Pustaka Firdays, 2002), h. 370

²⁶ Sohari Sahrani,.....,h. 199

²⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 205

Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-maall*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *amil*). Tanpa dua pelaku tersebut, maka akad *mudharabah* tidak ada.

2) Objek *Mudharabah* (modal dan kerja).

Merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya sedangkan kerja yang diserahkan berbentuk keahlian, keterampilan manajemen skill, dan lain-lain. Sebagian ulama membolehkan modal berupa barang ataupun aset perdagangan, bahkan mazhab Hambali membolehkan penyediaan aset non-moneter (pesawat, kapal, alat transportasi) Sebagai modal. Modal tidak dapat berbentuk utang (pada pihak ketiga atau *mudharib*). Menurut Abu Hanifah, modal berupa barang adalah sah. Pemberian barang tersebut sama artinya dengan memberikan uang untuk diperniagakan yang labanya kemudian dibagi bersama sesuai dengan asa *qirad*.²⁸ Modal harus sedia dalam bentuk tunai atau aset. Selain itu modal harus diserahkan atau dibayarkan kepada *mudharib* dalam memungkinkan baginya untuk menggunakannya.

3) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*).

Merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela), disini kedua belah pihak harus rela bersepakat untuk mengikatkan diri

²⁸Khudori Soleh, *Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: Pertja, 1999), h.67

dalam akad *mudharabah*. Sipemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara sipelaksana usaha setuju dengan perannya berkontribusi kerja.

4) *Nisbah* Keuntungan.

Yaitu rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam jual beli. *Nisbah* ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang *bermudharabah*. *mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. *Nisbah* keuntungan ini yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.²⁹ Mengenai keuntungan di syaratkan:

a) Syarat keuntungan harus terpenuhi, margin profit ditentukan secara persentase (*uz'iyah*) misalnya bagian *sahib al-mall* sebesar 60% dan *mudharib* 40% dari total profit sehingga tidak sah apabila ditentukan secara nominal (*qodriyyah*). Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiah akad itu *fasid* (rusak), demikian halnya apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian pada kerjasama tersebut ditanggung bersama.³⁰

b) Keuntungan dalam perjanjian *mudharabah* disyaratkan harus jelas ketentuannya, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan. Hal ini di harapkan ada kejelasan dan ada kepastian diantara kedua belah

²⁹ *Ibid*, h.206

³⁰ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h.77

pihak. Selain itu *mudharib* akan menerima bagiannya dari keuntungan bukan dari jumlah modal.

- c) Keuntungan dikhususkan kepada kedua belah pihak yang melakukan kerja sama oleh karena itu tidak sah apabila sebagian keuntungan tersebut untuk orang yang selain mereka (dua pihak) kecuali untuk kedua orang dari budak mereka apa yang disyaratkan untuk salah satu dari dua orang budak haruslah dipadukan kepada apa yang disyaratkan untuk tuannya.³¹

b. Syarat Sah *Mudharabah*

Syarat-syarat sah *mudharabah* yaitu berkaitan dengan *aqidain* (dua orang yang akan berakad), modal dan usaha.

1) *Aqidain* (orang yang akan melakukan akad)

Dalam akad *mudharabah* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha. Tanpa dua pelaku tersebut akad *Mudharabah* tidak akan ada. Para pihak yang melakukan akad disyaratkan sebagai berikut :

- a) Cakap bertindak hukum secara syar'i, artinya *shahib al-mall* memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan *mudharib* memiliki kapasitas menjadi pengelola.
- b) Memiliki kewenangan mewakilkan atau memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa, karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal

³¹ Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, *Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syari'ah*, Volume 1. No 2, Desember 2013, h.313

kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengolah modal tersebut.

- c) Pemilik modal (*shahib al-mall*) adalah orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya tidak dalam keadaan terpaksa atau kehendaknya sendiri. Sedangkan bagi orang yang menjalankan pekerjaannya selain cakap, ia juga harus merupakan orang yang jujur dan pandai berdagang, diharuskan juga sebab ia memegang uang dengan izin pemilik modal, dengan kata lain adalah orang yang membawa amanah dari orang yang memiliki harta tersebut.³²

2) Adanya Modal

- a) Modal harus berupa uang, pendapat mayoritas ulama' modal harus berupa uang dan tidak boleh berupa barang. Mereka beralasan *mudhrabah* dengan barang dapat menimbulkan kesamaran. Akan tetapi terdapat sebagian ulama membolehkan modal berupa barang atau aset perdagangan.
- b) Modal harus diketahui dengan jelas dan di ketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad *mudharabah* sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlah.

³² Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.228

- c) Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti ada di tempat akad. Juga di perbolehkan mengusahakan harta yang dititipkan kepada orang lain.
- d) Modal harus di berikan kepada pegusaha. Hal itu dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakannya, yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah.³³

3) Laba

a) Laba Harus Memiliki Ukuran

Mudharabah dimaksudkan untuk mendapatkan laba. Jika laba tidak jelas, *mudharabah* batal. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung oleh kedua orang yang berakad, maka akad rusak, tetapi *mudharabah* tetap sah. Hal ini karena didalam *mudharabah*, kerugian harus ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan apabila pemilik modal mensyaratkan laba harus diberikan semuanya kepadanya hal itu tidak dikatakan *mudharabah*, tetapi pedagang.

b) Laba Harus Berupa Bagian yang Umum (*masyhur*)

Pembagian laba harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti kesepakatan di antara orang yang melangsungkan akad bahwa setengah laba adalah untuk pemilik modal, sedangkan

³³ *Ibid*, h.229

setengahnya lagi diberikan kepada pengusaha. Akan tetapi, tidak di bolehkan menetapkan jumlah tertentu bagi satu pihak dan sisanya bagi pihak lain, seperti menetapkan laba 1.000 bagi pemilik modal dan menyerahkan sisanya bagi pengusaha.

5. Hukum *Mudharabah*

Jika Suatu akad *mudharabah* telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana dikemukakan, berlaku hukum-hukum sebagai berikut:³⁴

- a. Modal ditangan pekerja atau pengelola berstatus amanah dan seluruh tindakannya sama dengan tindakan seorang wakil dalam jual beli. Apabila terdapat keuntungan, status pekerja berubah menjadi serikat dagang yang memiliki bagian modal ditangan pekerja atau pengelola berstatus amanah, dan seluruh tindakannya dari keuntungan dagang.
- b. Apabila akad berbentuk akad *mudharabah mutlaqah*, pekerja bebas mengelola modal dengan jenis barang dagangan apa saja, di daerah mana saja, dan dengan siapa saja, dengan ketentuan bahwa apa yang ia lakukan akan mendatangkan keuntungan. Akan tetapi, ia tidak boleh mengutangkan modal

³⁴Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2015), h.77

itu kepada orang lain dan juga tidak boleh *memudharabahkan* modal itu kepada orang lain.

- c. Dalam akad *mudharabah*, pekerja berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Jika kerjasama itu mendatangkan keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan keuntungan dan modalnya kembali, akan tetapi jika kerja sama itu tidak menghasilkan keuntungan, pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa. Syarat umum dan khusus akad tersebut dalam pelaksanaannya harus dipenuhi seluruhnya.

6. Prinsip-Prinsip *Mudharabah*

Mudharabah sebenarnya adalah sub sistem dari *musaqqah*. Namun, para ahli *fiqih* Islam meletakkan *mudharabah* dalam posisi tersendiri dan memberikan dasar hukum yang khusus, baik dari segi Al-Qur'an maupun dari sunnah dan yang lainnya. Prinsip *mudharabah* ialah prinsip bagi hasil, yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha.

Pada perjanjian *mudharabah* pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu usaha, dan pengusaha setuju untuk mengelola, dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang diawasi mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal, kecuali kerugian itu terjadi karena

karena penyelewengan atau kesalahan pengelola.³⁵ Apabila terjadi kerugian yang merupakan konsekuensi bisnis semata (bukan karna penyelewengan) maka kerugiannya akan ditanggung secara bersama-sama antara pemodal dengan pengelola sesuai dengan perjanjian. Dengan prinsip itu semakin jelas bahwa sistem ekonomi Islam tampak memiliki sifat dan semangat kebersamaan serta keadilan.

Prinsip-prinsip *mudharabah* tidak terlepas dari prinsip-prinsip *muamalah* Islam, sebab *mudharabah* harus tetap mengacu pada aturan syari'at Islam, dan aturan *fiqh muamalah* menjadi indikatornya. Artinya sesuai atau tidaknya mekanisme dalam *mudharabah* ini sangat ditentukan dengan prinsip-prinsip *muamalah* Islam.

Adapun prinsip pokok akad *mudharabah* yang harus di penuhi adalah sebagai berikut:³⁶

- a. *Mudharabah* adalah suatu pengaturan ketika seseorang berpartisipasi dengan menyediakan sumber pendanaan / uangnya dan dan pihak lainnya menyediakan tenaganya. Dan dengan mengikutsertakan bank, reksadana, atau institusi, dan orang lainnya.
- b. Seorang *mudharib* yang menjalankan bisnis dapat diartikan sebagai orang pribadi, sekumpulan orang, atau suatu badan hukum dan badan usaha.
- c. *Rabbul mall* harus menyediakan investasinya dalam bentuk uang atau sejenisnya, selain daripada piutang, dengan nilai valuasi yang di sepakati bersama yang dilimpahkan pengelola sepenuhnya kepada *mudharib*.

³⁵ Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), H.84

³⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, , h.172

- d. Pengelolaan usaha *mudharabah* harus dilakukan secara eksklusif oleh *mudharib* dengan kerangka kesepakatan yang ditetapkan dalam kontrak *mudharabah*
- e. Keuntungan harus dibagi dalam suatu proporsi yang disepakati pada awal perjanjian dan tidak boleh ada pihak yang berhak untuk memperoleh nilai imbalan yang ditetapkan dimuka.
- f. Kerugian finansial dari kegiatan usaha *mudharabah* harus ditanggung oleh *rabbul mall*, kecuali jika terbukti *mudharib* melakukan kecurangan, kelalaian atau kesalahan dalam mengelola secara sengaja atau bertindak tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian *mudharabah*.
- g. Kewajiban dari *rabbul mall* tersebut sebesar nilai investasinya kecuali dinyatakan lain dalam perjanjian *mudharabah*
- h. *Mudharabah* dapat bervariasi tipenya yang dapat dengan satu atau banyak tujuan, bergulir atau periode tertentu, tergantung dengan kondisi yang ditetapkan.
- i. *Mudharib* dapat menginvestasikan dananya dalam bisnis *mudharabah* dengan persetujuan *rabbul mall*, persyaratannya adalah *rabbul mall* tidak boleh memperoleh porsi keuntungan lebih besar dari pada porsi investasinya terhadap total investasi proyek *mudharabah*, kerugian harus dibagi sesuai dengan proporsi modal dari masing-masing pihak.

Dalam urusan modal menurut Madzhab Hanbali, boleh saja sebagian modal itu berada ditangan pemilik modal, asal saja tidak mengganggu kelancaran jalan

perusahaan tersebut. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan, bahwa pembagian keuntungan harus jelas persentasenya 60% : 40% , 50% : 50% dan sebagainya menurut kesepakatan bersama, biasanya dicantumkan dalam surat perjanjian yang dibuat notaris.

Berdasarkan prinsip-prinsip *mudharabah* yang telah dijelaskan di atas, yaitu sistem kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dalam bentuk akad *mudharabah* sangat terasa ketika dapat membantu perekonomian kaum lemah yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal untuk melakukan sebuah usaha guna memenuhi kebutuhan hidup dan yang terpenting mencegah kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin.

Apabila terjadi persengketaan, maka penyelesaiannya tidak begitu rumit. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama Hanafiah akad itu *fasid* (Rusak). Demikian juga halnya jika pemilik modal mensyaratkan, bahwa kerugian harus ditanggung bersama, dan jika keuntungan tidak dibagi dalam proporsi yang telah disepakati di awal, maka akad itu batal menurut ulama Hanafiah.

7. Ketentuan Bagi Hasil Prinsip *Mudharabah*

Ketentuan *mudharabah*, ketentuan *mudharabah* menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

Pasal 238

- a. Suatu benda yang berada di tangan *mudharib* yang diterima dari *shohib al-mall* adalah modal

- b. *Mudharib* berkedudukan sebagai wakil *shohib al-mall* dalam menggunakan modal yang di terimanya
- c. Keuntungan yang dihasilkan dalam *mudharabah* menjadi milik bersama

Pasal 239

- a. *Mudharib* berhak membeli barang yang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung
- b. *Mudharib* berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik dengan tunai maupun cicilan
- c. *Mudharib* berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan pengalihan piutang
- d. *Mudharib* tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak biasa dilakukan oleh para pedagang

Pasal 240

Mudharabah tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan atau meminjamkan harta kerja sama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal

Pasal 241

- a. *Mudharib* berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang jika telah disepakati dalam akad *mudharabah*
- b. *Mudharib* berhak menandatangani dan menginfestasikan harta kerjasama dengan sistem syariah

- c. *Mudharib* giat menghubungi pihak lain untuk melakukan jual beli barang sesuai kesepakatan dalam akad

Pasal 242

- a. *Mudharib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad
- b. *Mudharib* tidak berhak mendapatkan imbalan jika usaha yang dilakukan rugi

Pasal 243

- a. Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati oleh akad
- b. Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan jika usaha yang dilakukan oleh *Mudharib* merugi

Pasal 244

Mudharib tidak boleh mencampurkan kekayaan sendiri dengan harta kerja sama dalam melakukan *mudharabah*, kecuali sudah menjadi kebiasaan dikalangan pelaku usaha

Pasal 245

Mudharib dibolehkan mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta *mudharabah* jika mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu

Pasal 246

Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran atau *shahib*

al-mall dengan *mudharib* dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.

Pasal 247

Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *mudharib* dalam rangka menjalankan bisnis kerjasama, dibebankan pada modal dari *shahib al-mall*

Pasal 248

Mudharib wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad

Pasal 249

Mudharib wajib bertanggung jawab terhadap resiko kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam akad

Pasal 250

Akad *mudharabah* selesai apabila waktu kerjasama yang disepakati dalam akad telah berakhir

Pasal 251

- a. Pemilik modal dapat memberhentikan atau memecat pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad *mudharabah*
- b. Pemberhentian kerjasama oleh pemilik modal diberitahukan kepada *mudharib*
- c. Perelisisan antara pemilik modal dengan *mudharib* dapat diselesaikan dengan perdamaian atau melalui pengadilan

Pasal 252

Kerugian usaha dan kerusakan barang dagang dalam kerjasama *mudharabah* yang terjadi bukan karna kelalaian *mudharabah*, dibebankan kepada pemilik modal

Pasal 253

Akad *mudharabah* berakhir dengan sendirinya jika pemilik modal atau *mudharib* meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum

Pasal 254

- a. Pemilik modal berhak melakukan penagihan kepada pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari *mudharib* yang telah meninggal dunia
- b. Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya *mudharib*, dibebankan pada pemilik modal

8. Biaya Operasional Mudharabah

Biaya operasional *mudharabah* diambil dari hartanya sendiri selama ia tinggal di lingkungan sendiri, demikian juga apabila mengadakan perjalanan untuk kepentingan *mudharabah*. Apabila biaya *mudharabah* diambil dari keuntungan, kemungkinan pemilik modal tidak akan memperoleh bagian dari keuntungan karena mungkin saja modal tersebut sama besar bahkan lebih besar dari keuntungan.

Namun, jika pemilik modal mengizinkan pengelola modal untuk membelanjakan modal *mudharabah* guna keperluan dirinya ditengah perjalanan

atau karena penggunaan tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka ia boleh menggunakan modal *mudharabah* tersebut.

Kiranya dapat dipahami bahwa biaya pengelolaan *mudharabah* pada dasarnya dibebankan kepada pemilik modal, namun tidak masalah biaya diambil dari keuntungan apabila pemilik modal mengizinkannya atau berlaku menurut kebiasaan. Menurut Imam Malik, menggunakan modalpun boleh apabila modalnya besar sehingga kemungkinan memperoleh keuntungan berikutnya.³⁷

Sedangkan menurut Imam Hambali adalah sebagai berikut:

- a. *Shahibul mall* mengeluarkan 100% kebutuhan suatu proyek kerjasama, sedangkan *mudharib* hanya sebagai pengelola usaha.
- b. Jangka waktu usaha di tentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
- c. Jumlah pembiayaan harus dinyatakan secara tunai.
- d. *Shahibul mall* menanggung segala kerugian akibat dari *mudharabah*, kecuali jika kerugian usaha tersebut terjadi atas kelalaian pengelola.
- e. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.

9. Resiko Kerugian dalam Akad *Mudharabah*

Resiko merupakan segala sesuatu yang harus ditanggung oleh pihak yang melakukan perikatan.³⁸ Resiko adalah bagian dari keadaan memaksa, artinya beban yang harus diterima oleh pihak-pihak yang terikat dalam perikatan. Resiko kerugian modal pokok akad yang muncul sebelum *mudharib* melakukan

³⁷ Ibid,...,h.142

³⁸ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.111

perniagaan, yang bukan akibat kecerobohan *mudharib* ditanggung pihak *shahib al-mall* sepenuhnya. Dalam hal ini ulama Mazhab Hanafi, dan Hambali sependapat bahwa si pelaku usaha tidak berkewajiban mengganti jika terdapat kerugian karena perniagaan.

Mudharabah merupakan suatu perniagaan yang menghendaki adanya modal, sebagai amanat yang tidak ada jaminan padanya selama pihak usaha tidak melakukan kelalaian. Orang yang menjalankan modal usaha dagang dalam transaksi *mudharabah* adalah amin (orang yang mendapat amanah). Apabila pelaku usaha melakukan kelalaian, ia bertanggung jawab atas kerugian yang dialami dalam arti ia wajib mengganti jika terjadi hal yang merugikan pihak pemilik modal. Pemilik modal tidak boleh mensyaratkan kepada *mudharib* untuk menanggung kerugian yang terjadi karena ia adalah orang yang mendapatkan amanah. Apabila terjadi kesepakatan yang demikian, maka akad *mudharabah* menjadi rusak (*fasid*) karena menyalahi aturan dalam *mudharabah*.³⁹

Resiko yang terdapat di dalam akad *mudharabah* terutama dalam penerapannya relatif tinggi, diantaranya anatara lain:⁴⁰

- a. Menggunakan modal bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak.
- b. Lalai dalam kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh pihak pengelola, bila pengelola tidak jujur.

³⁹ As-Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), h.98

⁴⁰ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*,, h.219

Dalam penerapan sistem *mudharabah* tidak ada suatu ketentuan mengenai sesuatu yang bisa dijadikan sebagai jaminan bagi penanam modal karena jaminan dalam sistem *mudharabah* ditetapkan dalam bentuk kepercayaan.

10. Hikmah *Mudharabah*

Islam mensyari'atkan dan membolehkan bagi hasil demi memberikan kemudahan kepada manusia. Terkadang sebagian dari mereka memiliki harta, tetapi tidak mampu mengembangkannya dan sebagian yang lain tidak memiliki harta tetapi memiliki kemampuan untuk mengembangkannya. Karena syari'at membolehkan *muamalah* ini agar masing-masing dari keduanya mendapatkan manfaat. Pemilik modal memanfaatkan keahlian *mudharib* (pengelola) dan *mudharib* memanfaatkan harta, dengan demikian terwujudlah kerjasama harta dan amal. Allah SWT tidak mensyari'atkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.⁴¹

Mudharabah mengandung hikmah yang besar dalam masyarakat, karena memupuk individu agar selalu memiliki sifat tolong-menolong dan jiwa gotong royong sesama anggota masyarakat. Selain itu hikmah disyari'atkannya *mudharabah* yang dikehendaki *syar'i* yang maha bijaksana adalah untuk menghilangkan kefakiran dan untuk menjalin kasih kasih sayang antara sesama manusia.

Hikmah lain di perbolehkannya kerjasama dengan menggunakan sistem bagi hasil atau di sebut *mudharabah* adalah terciptanya rasa persaudaraan (*ukhuwah*)

⁴¹ Briefcase Book, *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 39

dan rasa tolong menolong (*ta'awun*) yang erat diantara kaum muslimin yang memiliki satu keahlian dalam bidang tertentu, sehingga kecemburuan sosial antara umat Islam dalam suatu masyarakat dapat dihindarkan.

11. Berakhirnya *Mudharabah*

Kontrak kerja sama dalam permodalan (*mudharabah*) akan berhenti jika salah satu pihak menghentikan kontrak, meninggal atau modal yang ditanamkan mengalami kerugian ditangan pengelola modal (*mudharib*). Akad kerjasama dalam permodalan juga akan batal ketika pemilik modal murtad, sama halnya dengan pengelola modal. Selain itu *mudharabah* akan dikatakan *fasid* jika terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi.

Akad *Mudharabah* dapat berakhir disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:⁴²

- a. Meninggalnya salah satu pihak, baik pihak pemilik modal atau pihak pengelola/pekerja. Karena akad *mudharabah* hukumnya sama seperti akad *wakalah* yang berakibat batal karena meninggalnya salah satu pihak, baik pihak yang mewakilkan (*muwakkil*) atau pihak yang di wakilkkan (*wakil*). Dan sesuatu yang menyebabkan batalnya akad *wakalah*, maka batal juga dalam akad *mudharabah*. Pendapat ini di kemukakan oleh ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Adapun menurut ulama Malikiyah meninggalnya salah satu pihak tidak menyebabkan batalnya akad *mudharabah*, karena ahli warisnya dapat meneruskannya.

⁴²Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h.166

- b. Hilangnya kecakapan dalam bertindak dari kedua belah pihak, seperti hilang akal karena gila dan pingsan.
- c. Kedua belah pihak atau salah satunya mengundurkan diri.
- d. Musnah atau hilangnya modal secara keseluruhan di tangan pihak pengelola modal sebelum di belanjakan, sehingga tidak mungkin bisa melaksanakan pengelolaan modal, seperti karena di curi orang lain atau terbakar. Adapun kalau hilangnya hanya sebagian, maka modal yang tersisa tidak batal dan bisa dilanjutkan.
- e. Pihak pemilik modal menarik kembali modal yang telah diberikan kepada pihak pengelola atau pekerja.
- f. Pihak pemilik modal *murtad*. Karena *murtad* dapat menghilangkan keahlian kepemilikan modal, dan harta orang *murtad* dibagikan kepada para ahli warisnya. Akan tetapi jika kembali lagi kepada Islam, maka akad bisa diteruskan lagi. Pendapat tersebut di kemukakan oleh Imam Abu Hanifah.

C. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah membaca beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang terikat dengan judul tentang akad bagi hasil, adalah sebagai berikut:

- a. Skripsi yang di buat oleh Melinda pada tahun (2019), dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dengan Pengelola, (Studi pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung)*”. Hasil penelitian yang telah di lakukan pada toko Wanti Pasar Panjang Bandar

Lampung tentang praktik kerjasama yang diterapkan, menjelaskan bahwa dalam penerapannya terdapat penyimpangan dari ketentuan perjanjian awal. Dalam perjanjian awal tidak disebutkan bahwa perubahan kewajiban pemilik modal membayar gaji karyawan dan sewa bangunan berpindah menjadi kewajiban pengelola. Dan tidak adanya perubahan persentase bagi hasilnya. Tinjauan hukum Islam tentang praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola pada toko Wanti Pasar Panjang adalah tidak sesuai dengan syariat dan ketentuan Islam, yaitu Terjadinya perubahan pada ketentuan akad tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak yang menyebabkan pihak lain merasa dirugikan dan termasuk perbuatan yang dzalim, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam bahwa bermuamalah harus adil dan atas keridhaan kedua belah pihak.⁴³

- b. Skripsi yang dibuat oleh Merysa Tria Andryani (2018), dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo Di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik*” hasil penelitiannya adalah bahwa praktek kerja sama bagi hasil dalam bengkel Dinamo Zayn Teknik merupakan perjanjian kerjasama bagi hasil yang dilakukan dengan kad *mudharabah*, dimana pihak pertama (pemilik modal), menanamkan modalnya sebanyak 100% dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan dalam kerjasama bagi hasil ini telah ditentukan pada awal yakni sebesar 10% dari modal usaha untuk pemilik modal, sedangkan sisanya akan menjadi hak pengusaha. Dan akad kerjasama bagi hasil tersebut tidak sesuai

⁴³ Melinda, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dengan Pengelola, Studi pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung*, (Skripsi Program Sarjana Muamalah UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 80

dengan syarat sahnya akad *mudharabah* dikarenakan adanya penentuan keuntungan pada awal akad kepada pemilik modal serta terdapatnya unsur ketidakpastian pada keuntungan yang di dapatkan oleh pengusaha.⁴⁴

- c. Skripsi yang dibuat oleh Nira Sulistiawati (2018), dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Bagi Hasil Pemilik Lahan Tambang Pasir dan Buruh Pekerja di Desa Lenek Daya Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur*.”

Hasil penelitiannya adalah bahwa pelaksanaan bagi hasil didasarkan pada asas kekeluargaan dan saling menolong satu sama lain, pemilik lahan dan pekerja dengan secara lisan mengikat diri dengan kesepakatan pembagian hasil yang seimbang dengan modal. Selain itu ada juga beberapa lokasi penambangan membagi hasil dengan berdasarkan keuntungan dengan kerugian ditanggung oleh satu pihak.⁴⁵

Dari ketiga penelitian diatas, terdapat perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, persamaan penelitian diatas dengan sekarang hanya sama-sama melakukan kerja sama bagi hasil, sedangkan yang membedakan penelitian diatas dengan penelitian sekarang adalah perjanjian awal tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

⁴⁴Merysa Tria Andryani, *Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik*, (program sarjana Muamalah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

⁴⁵Nira Sulistiawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Bagi Hasil Pemilik Lahan Tambang Pasir dan Buruh Pekerja di Desa Lenek Daya Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur*, (Skripsi Program sarjana Muamalah UIN Mataram, 2018)

DAFTAR PUSTAKA

- Aduwarman A. Karim, *BANK ISLAM Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam*, Terjemahan Abu Ahmadi dan Anshari Umar Sitangga, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muaamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017)
- Anwar Samsul, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)
- Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Mekar Sari, 2008)
- Dr Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Hidayat Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016)
- Ibn Al-Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2011)
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Karisma Putra Utama, 2011)
- Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997)
- Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, *Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syari'ah*, Volume 1. No 2, Desember 2013

Manan Abdul, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Terjemahan M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)

Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)

Pasaribu Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994)

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* ,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)

Sahroni Oni ,*Fikih Muamalah*, (Depok :PT RajaGrafindo Persada,2017)

Sohari sahroni dan ru'fah abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Febi UIN-SU Press, 2018)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

Susiadi, *Metodelogi Penelitian*, (Bandar Lampung: Penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015)

Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*,(Bogor: Al-Azhar Press, 2010)

